

PENGARUH INDEKS ZAKAT NASIONAL, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM, PENGANGGURAN TERBUKA DAN RASIO GINI TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI BANTEN TAHUN 2019-2024)

Muhammad Ersad Saerendra¹, Moh Mukhsin², Mohamad Ainun Najib³

^{1, 2, 3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

muhammadersadsaerendra@gmail.com

Abstrack

This study aims to determine the effect of the national zakat index, human development index, minimum wage, open unemployment and gini ratio on poverty in the Regency and City of Banten Province in 2019-2024. The research method used in this study is quantitative with the type of panel data obtained from third parties (secondary) and analyzed using panel data regression analysis techniques with the help of Eviews 12 software. The results show that partially only the human development index and minimum wage variables have a significant effect on poverty, while the national zakat index, open unemployment and gini ratio variables do not affect poverty. However, simultaneously the variables of the national zakat index, human development index, minimum wage, open unemployment and gini ratio affect poverty and the R2 value is 0.98, which means that the poverty rate in the Regency and City of Banten Province can be explained by the variables in this study by 98%. While the remaining 2% is explained by variables outside this study.

Keywords: National Zakat Index, Human Development Index, Minimum Wage, Open Unemployment, Gini Ratio

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari indeks zakat nasional, indeks pembangunan manusia, upah minimum, pengangguran terbuka dan rasio gini terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2019-2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis data panel yang diperoleh dari pihak ketiga (sekunder) dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan *software* Eviews 12. Dengan Hasil menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel indeks zakat nasional, pengangguran terbuka dan rasio gini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun, secara simultan variabel indeks zakat

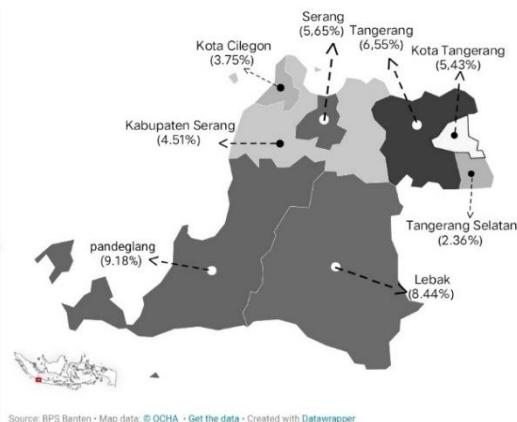
nasional, indeks pembangunan manusia, upah minimum, pengangguran terbuka dan rasio gini berpengaruh terhadap Kemiskinan serta nilai R^2 sebesar 98%.

Kata Kunci: Indeks Zakat Nasional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka, Rasio Gini

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah yang sulit diatasi di beberapa wilayah. Salah satunya Provinsi Banten, Banten merupakan provinsi yang berada di ujung barat pulau jawa yang berada berdekatan dengan pusat ekonomi nasional yakni jakarta, yang seharusnya mendapatkan manfaat ekonomi dari kedekatannya dengan pusat pertumbuhan tersebut. Berdasarkan teori growth pole yang dikemukakan oleh Francois Perroux daerah yang dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi seharusnya merasakan spread effect akibat adanya perputaran ekonomi yang ada di daerah pusat, kemudian akan menyebar ke daerah sekitarnya (Fudhail et al., 2021). Namun kondisi di Banten tidak sepenuhnya mencerminkan teori tersebut, hal tersebut tercermin melalui peta berikut:

Gambar 1. Peta kemiskinan Banten 2024



Tingkat kemiskinan di Banten pada tahun 2024 mencapai 5,84 % angka tersebut mengalami penurunan pada periode sebelumnya. Namun, terdapat ketimpangan signifikan di wilayahnya hal tersebut dapat tergambar melalui peta di atas dimana wilayah dengan kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Pandeglang (9,18%) dan Kabupaten Lebak (8,44%). Sebaliknya Kota Tangerang Selatan memiliki persentase kemiskinan yang Sangat rendah yang hanya sebesar 2,36%. Yang dimana dengan angka tersebut Memiliki ketimpangan yang besar dengan wilayah tertinggi dalam hal kemiskinan, Bahkan apabila dibandingkan antara Tangerang Selatan

(2,36%) dengan wilayah Lain yang sama-sama berdekatan dengan jakarta yakni Kota Tangerang (5,43%) juga masih terlampaui jauh.

Perbedaan yang signifikan ini mencerminkan ketimpangan kesempatan ekonomi di masyarakat yang terjadi di antara wilayah banten. Yang mana di dalam Islam terdapat instrumen filantropi yang memungkinkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi melalui pencegahan penumpukan harta pada satu individu saja yakni zakat (Ismail, 2020). Yang mana Menurut Siregar & Hidayat (2024) dan Syamsuri *et al* (2022) instrumen tersebut juga dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan, melalui mekanisme pelaksanaannya yang hanya mengambil pada individu yang telah memenuhi syarat (*nisab*).

Untuk melihat efektivitas dari zakat dalam mengentaskan kemiskinan Pusat Kajian Strategis BAZNAS membuat suatu instrumen yakni indeks zakat nasional yang dalam penentuan nilai indeksnya meliputi 2 indikator yakni indikator makro dan indikator mikro, kedua indikator tersebut saling berhubungan untuk menentukan nilai IZN, yang berfungsi sebagai acuan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja zakat baik di tingkat nasional maupun Provinsi (Baznas)

Kemudian, dalam upaya mengentaskan kemiskinan, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan kemiskinan tersebut sulit untuk diatasi. Salah satu teori yang menjelaskan hal ini adalah Vicious Circle Of Poverty yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Teori ini menyebutkan bahwa keterbelakangan sumber daya manusia, kekurangan modal dan ketidaksempurnaan pasar menjadi faktor terjadinya kemiskinan, faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga kemiskinan sulit diatasi (Goni *et al.*, 2022).

Faktor yang pertama ialah keterbelakangan sumber daya manusia. Hal tersebut tidak heran apabila menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi sulitnya mengatasi kemiskinan karena kualitas sumber daya manusia memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah (Putri, 2023). Salah satu indikatornya yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan hidup layak. Yang mana semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin baik pula kualitas hidupnya yang mencerminkan peningkatan akses dalam layanan pendidikan, kesehatan serta juga ekonomi (Karyono *et al.* 2021)

Selanjutnya, faktor yang kedua adalah kekurangan modal. Keterbatasan modal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan dalam mengakses sumber pendanaan. Dalam konteks ini, penetapan upah minimum dapat mengukur keterkaitan antara modal dan kesejahteraan (Akbar *et al.*, 2022). Kemudian, faktor yang terakhir ialah ketidaksempurnaan pasar. Salah satu faktor yang disebabkan adanya ketidaksempurnaan pasar adalah pengangguran, dimana

pengangguran terjadi akibat adanya ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja baik dalam perbedaan antara jumlah angkatan kerja yang siap bekerja yang banyak dengan lapangan pekerja yang sedikit, maupun perbedaan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan ketersediaan pekerja dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, sehingga inilah yang dapat menyebabkan pengangguran semakin meningkat (Khatimah, 2021)

Selain pengangguran, ketimpangan pendapatan juga menjadi salah satu dampak adanya ketidaksempurnaan pasar yang dimana menurut Oktaviani *et al* (2022) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi, masih menjadi permasalahan bagi negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan berbagai permasalahan baik ekonomi, sosial maupun kesehatan yang terjadi di masyarakat (Siara, 2021). Ihsani & Rohman (2022) menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan dapat semakin memburuk akibat dari adanya ketimpangan pada distribusi pendapatan, dengan kata lain semakin tinggi ketimpangan maka semakin buruk dampaknya terhadap kemiskinan. Salah satu indeks yang biasanya digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya ketimpangan pada distribusi pendapatan adalah rasio gini.

Dengan uraian diatas, dengan adanya fenomena yang terjadi berbeda dengan teori yang ada, dimana apabila dibandingkan dengan grafik kemiskinan yang terjadi banten mengalami ketimpangan kemiskinan yang besar di antara wilayah dengan teori pole growth, yang dimana seharusnya banten mendapatkan limpahan ekonomi dari jakarta, namun kenyataan yang terjadi tidak demikian tentu hal tersebut membuat peneliti tertarik meneliti lebih lanjut terkait kemiskinan. Dengan kebaruan memperkecil ruang lingkup penelitian pengaruh IZN terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten dan diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan bagi pemerintah daerah, lembaga filantropi serta pemangku kebijakan lainnya dalam merancang kebijakan yang efektif guna mengurangi ketimpangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh Wilayah Banten.

2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Vicius circle of poverty

Teori vicious circle of poverty atau teori lingkaran kemiskinan yang dipopulerkan oleh Ragnar Nurkse tahun 1953 dalam Goni *et al* (2022) yang menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di masyarakat menjadi sangat sulit diatasi diakibatkan ada beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor tersebut meliputi ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan sumber daya manusia dan kekurangan modal yang menyebabkan produktivitas rendah, sehingga orang memperoleh pendapatan yang sedikit, dengan pendapatan yang sedikit, mereka tidak dapat menabung atau berinvestasi dalam hal yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi, tanpa investasi tidak ada uang untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau

meningkatkan peluang, hal ini membuat pendapatan rendah, dan kemudian siklus kemiskinan tersebut berulang.

2.2 Teori distribusi kekayaan Islam

Distribusi kekayaan Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukanlah kepemilikan mutlak individu semata, melainkan harus dikelola agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Konsep ini ditekankan dalam QS Al-Hasyr (59:7) yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar pada kalangan kaya saja, melainkan harus di distribusi secara merata. Dalam hal ini Islam memastikan bahwa seluruh individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, melalui mekanisme seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf guna mendorong distribusi yang adil (Amsari *et al.*, 2023).

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, dimana ketika mereka hidup di bawah garis kemiskinan yang pada umumnya, mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari layak, akibat memiliki keterbatasannya dalam sumber daya materi untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup yang jauh dibawah standar (Rahman *et al.*, 2019). Dalam Islam sendiri, kemiskinan dipandang sebagai masalah serius karena dapat menimbulkan kemudharatan di bumi. Kehidupan yang tidak layak akibat kekurangan harta dapat memicu permasalahan lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras serta saling membantu kepada mereka yang membutuhkan sebagai langkah untuk keluar dari kemiskinan, melalui distribusi kekayaan yang adil (Shilat *et al.*, 2024)

2.4 Indeks zakat nasional

Definisi zakat sendiri ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai kondisi-kondisi tertentu, seperti mencapai nisab, untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka zakat dapat menjadi bentuk empati dan kepedulian antar sesama serta zakat juga dapat memperkuat hubungan spiritual dengan tuhan karena dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap agama (Suhartono *et al.*, 2024). Dalam mekanisme penyalurnya kepada 8 asnaf, zakat tidak hanya berupa makanan dan minuman sekali pakai saja, tetapi penyalurnya juga bisa berupa bantuan yang dapat membantu mengubah kondisi kehidupan mereka jauh lebih baik melalui zakat produktif yang berprinsip pada pendayagunaan. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh haknya sebagai manusia dan meningkatkan kualitas hidupnya, maka dari itu zakat memiliki potensi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi umat, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan (Anis, 2020). Berkaitan dengan hal tersebut untuk melihat sejauh mana kinerja pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut, pusat kajian strategis baznas merumuskan suatu alat ukur

pada tahun 2016 dengan nama Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Zakat Nasional (IZN) sendiri dapat digunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan zakat nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahik) dalam nasional dan Provinsi (Baznas, 2024)

2.5 Indeks pembangunan manusia

Indeks ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya mencakup standar hidup, tetapi juga aspek pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Ketika IPM rendah, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan sebaliknya, IPM berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan (Fuady *et al.*, 2021).

2.6 Upah minimum

Upah minimum adalah penetapan batas pengupahan yang ditetapkan oleh negara, Dampak penetapan upah minimum tersebut, bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja. Dalam pasar yang sehat dan kompetitif, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan pekerja, daya beli dan kualitas hidup, namun jika pasar tidak kompetitif akan menimbulkan tantangan, seperti pengurangan tenaga kerja atau kesulitan bagi usaha kecil, yang efeknya juga mempengaruhi cara penerapannya. Upah yang terlalu tinggi akan meningkatkan biaya produksi, sementara yang terlalu rendah kurang efektif dalam melindungi pekerja, oleh karena itu, penetapan upah minimum perlu memperhatikan beberapa kondisi ekonomi agar memberikan manfaat yang optimal (Husni *et al.*, 2023; Varsitya *et al.*, 2023).

2.7 Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka menggambarkan individu yang siap dan mampu bekerja serta termasuk dalam angkatan kerja yang aktif, namun saat ini tidak memiliki pekerjaan atau tengah mencari pekerjaan. Kondisi ini berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi karena mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas masyarakat, serta kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. (Parulian & Hukom, 2023).

2.8 Rasio gini

Rasio gini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendapatan merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diterima masyarakat tidak tersebar secara merata. Hal ini berarti bahwa sebagian individu atau kelompok menerima mungkin porsi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain, sehingga hal ini dapat menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Ketidakadilan ini sering dapat mempengaruhi akses terhadap kualitas hidup (Lala *et al.*, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal asosiatif dan deskriptif. Kemudian, populasi dari penelitian ini adalah

kemiskinan di 8 Kabupaten dan Kota Provinsi Banten serta sampel yang di ambil melalui teknik purposive sampling atau dikenal dengan judgment sampling, yakni pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang diperlukan dalam penelitian. Sampel ini tidak dipilih secara acak, melainkan ditentukan oleh penilaian peneliti untuk memastikan kesesuaian dengan karakteristik yang diinginkan (Fauzy, 2019). Maka, dengan kriteria yakni data yang di butuhkan untuk analisis tersedia secara lengkap dengan ini terdapat 6 sampel dari 8 populasi di mana dua wilayah ialah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang dikeluarkan karena data yang diperlukan untuk analisis tidak lengkap

Adapun data dalam penelitian ini merupakan data panel yang di ambil melalui pihak ke 3 (sekumder), yang kemudian di analisis melalui analisis deskriptif dan analisis regresi data panel yang meliputi: uji pemilihan model (cem, fem dan rem), uji asumsi klasik yang hanya melakukan 2 uji yakni (autokorelasi dan heterokedasitas) karena menurut Basuki & Prawoto (2016) dalam analisis data panel, uji autokorelasi tidak diwajibkan karena data panel memiliki sifat cross section yang mengamati banyak objek , sementara autokorelasi hanya relevan untuk data time series yang hanya fokus pada satu objek. Selain itu, Uji normalitas juga tidak perlu dilakukan karena bukan merupakan persyaratan yang harus di penuhi dan uji statistik (uji t, f dan r2).

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Tabel 1 hasil uji deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	6.016111	0.645833	72.97889	3738807.	7.975000	0.328944
Maximum	10.72000	0.870000	82.89000	4815103.	12.69000	0.395000
Minimum	1.680000	0.440000	63.88000	2498068.	4.780000	0.243000
Std. Dev.	2.700046	0.118282	6.440953	741025.2	1.549336	0.038815
Observations	36	36	36	36	36	36

Hasil analisis deskriptif yang dilakukan oleh peneliti menggunakan aplikasi E-Views menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten pada periode 2019-2024 terjadi di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021, yaitu sebesar 10,72%. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019, yaitu sebesar 1.68%. Secara keseluruhan, nilai rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Banten selama periode 2019-2024 adalah sebesar 6,01% dengan standar deviasi lebih kecil dari nilai rata rata yakni 2,70%.

Kemudian untuk Indeks Zakat Nasional yang didapatkan oleh Baznas wilayah yang ada di Provinsi Banten dalam periode 2019-2024 dengan nilai tertinggi didapatkan oleh Baznas Kota Cilegon pada tahun 2020 yakni 0,87. Sementara itu, Baznas dengan kinerja terendah pada periode ini yakni Baznas Kota Serang dan Baznas Kabupaten Lebak yakni sebesar 0,44 pada tahun 2023. Nilai rata-rata 0,64 dengan standar deviasi yang lebih kecil sebesar 0,11.

Indeks Pembangunan Manusia tertinggi terdapat di wilayah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 yakni 82,89. Sementara itu. Indeks Pembangunan Manusia yang terkecil berada di wilayah Kabupaten Lebak 63,88. Nilai rata-rata sebesar 72,97 dengan standar deviasi yang kecil yakni 6.44.

Upah Minimum Kabupaten atau Kota tertinggi berada di wilayah Kota Cilegon dengan nilai upah sebesar 4815103 pada tahun 2024. Sementara itu, wilayah yang paling kecil upah yang diterima oleh pekerja yang berada di wilayah Kabupaten Lebak dengan upah sebesar 2498068 pada tahun 2019. Dengan nilai rata-rata upah sebesar 3738807 dengan standar deviasi yang kecil sebesar 741025.

Tingkat Pengangguran Terbuka yang terjadi di Provinsi Banten pernah mencapai titik tertinggi pada periode 2019-2024 terjadi di Kota Cilegon pada tahun 2020 dengan pengangguran sebesar 12.69. Terendah pernah terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan sebesar 4.78 pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 7.975 dengan standar deviasi yang lebih kecil yakni sebesar 1.549.

Rasio Gini tertinggi yang terjadi di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten pada periode 2019-2024 pernah terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 sebesar 0.395. Sementara itu, yang terendah pada periode ini terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 sebesar 0.243. Nilai rata-rata sebesar 0.3289 yang nilai standar deviasi yang lebih rendah dengan nilai rata-rata nya yakni 0.038.

4.2 Hasil Uji Pemilihan Model

4.2.1 Uji chou

Tabel 2. Hasil uji chou

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	79.702202	(5,25)	0.0000
Cross-section Chi-square	101.869333	5	0.0000

Apabila dilihat dari hasil pengujian diatas yakni dengan nilai prob 0,0000 maka nilai prob < 0,05 maka dapat ditarik hasil bahwasanya dalam pengujian chou di dalam

penelitian ini yang terpilih adalah *fixed effect model*, maka langkah selanjutnya melakukan uji hausman.

4.2.2 Uji hausmen

Tabel 3. Hasil uji hausmen

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	398.511010	5	0.0000

Apabila dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas bahwa dengan nilai prob 0,000 yang berarti nilai prob < 0,05 maka dapat disimpulkan dalam uji ini juga yang terpilih adalah *fixed effect model* yang berarti dalam penelitian ini menggunakan model tersebut karena sudah terpilih di uji *chow* dan *hausman*.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Heteroskedastisitas

Uji ini untuk melihat apakah data terjadi heterokedasitas yang dapat dilihat melalui garis residual yang dihasilkan apabila garis tersebut berada dalam rentang 500 dan -500 maka aman dari heteroskedasitas, kemudian apabila melewati angka tersebut maka dapat disimpulkan data penelitian ini mengalami heteroskedasitas (Napitupulu *et al.*, 2021)

Gambar 2. Hasil uji heterokedasitas



Apabila dilihat dari grafik residual diatas dapat diketahui bahwasanya garis grafik hanya berada pada rentang -6 sampai 8 dan tidak melewati batas 500 dan -500. Maka dapat disimpulkan bahwasanya data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heterokedasitas.

4.3.2 Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi dalam analisis regresi ketika terdapat hubungan linear yang sangat kuat atau hampir sempurna di antara variabel-variabel

independen, sehingga menyulitkan dalam mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas, biasanya digunakan dua indikator utama, yaitu Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1, maka model regresi dianggap bebas dari masalah multikolinearitas yang signifikan (Mardiatmoko, 2020).

Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	18.81521	415.9621	NA
X1	3.714616	35.37010	1.117028
X2	0.006750	800.7830	6.018795
X3	4.24E-13	136.1697	5.009201
X4	0.026740	38.97787	1.379631
X5	79.04706	191.6527	2.559675

Berdasarkan pengujian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai VIF dari masing masing variabel berada dibawah nilai 10 dimana VIF dari Variabel X1 (Indeks Zakat Nasional) < 10, VIF dari Variabel X2 (Indeks Pembangunan Manusia) < 10, VIF dari Variabel X3 (Upah Minimum) < 10, VIF dari Variabel X4 (Pengangguran Terbuka) < 10 dan untuk VIF dari Variabel X5 (Rasio Gini) < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam data ini seluruh variabel terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.4 Hasil Analisis Regresi Data Penel

Tabel 5. Hasil analisis regresi data panel

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/24/25 Time: 07:54

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.61029	15.25675	4.824768	0.0001
X1	0.216008	0.646507	0.334115	0.7411

X2	-1.082645	0.221482	-4.888179	0.0000
X3	3.13E-06	5.35E-07	5.854889	0.0000
X4	-0.081725	0.060714	-1.346067	0.1904
X5	0.685314	3.126748	0.219178	0.8283

Adapun persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Maka rumus regresi data panel yang disesuaikan dengan model terpilih yakni *Fixed Effect Model (FEM)* adalah berikut ini:

$$Y_{it} = 73.610 + 0.216X_{1it} - 1.082X_{2it} + 3.130X_{3it} - 0.081X_{4it} + 0.685X_{5it} + E_{it}$$

4.5 Hasil Uji Statistik

4.5.1 Uji Parsial (T)

Tabel 6. Hasil uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.61029	15.25675	4.824768	0.0001
X1	0.216008	0.646507	0.334115	0.7411
X2	-1.082645	0.221482	-4.888179	0.0000
X3	3.13E-06	5.35E-07	5.854889	0.0000
X4	-0.081725	0.060714	-1.346067	0.1904
X5	0.685314	3.126748	0.219178	0.8283

- Indeks Zakat Nasional (X1) mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,7411, yang lebih besar dari 0,05 ($0,7411 > 0,05$). Hasil ini menggambarkan bahwa secara statistik pengaruh Indeks Zakat Nasional terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten tidak signifikan. Meskipun demikian, koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan arah hubungan yang positif. Namun, karena hubungan ini tidak signifikan secara statistik, maka tidak dapat disimpulkan secara kuat bahwa perubahan pada variabel ini benar-benar mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Banten dalam periode pengamatan 2019-2024

- 2) Indeks Pembangunan Manusia (X2) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang signifikan dengan koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan negatif. Artinya, setiap peningkatan variabel ini maka akan dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, perbaikan dalam IPM dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten sepanjang 2019-2024.
- 3) Upah Minimum (X3) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh signifikan dengan koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan positif. Artinya, setiap peningkatan variabel ini maka akan diikuti peningkatan dalam kemiskinan dalam periode 2019-2024.
- 4) Pengangguran Terbuka (X4) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1904 yang lebih besar dari 0,05 ($0,1904 > 0,05$). Hasil ini menggambarkan bahwa secara statistik pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tidak signifikan. Meskipun koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan arah hubungan yang negatif. Namun dikarenakan secara statistik tidak signifikan maka tidak dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam variabel ini benar benar memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Banten dalam periode pengamatan 2019-2024.
- 5) Rasio Gini (X5) mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,8283 yang lebih besar dari 0,05 ($0,8283 > 0,05$). Hasil tersebut menggambarkan bahwa secara statistik pengaruh Rasio Gini terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tidak signifikan. Meskipun koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan arah hubungan yang positif. Namun dikarenakan secara statistik tidak signifikan maka tidak dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam variabel ini benar benar memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Banten dalam periode pengamatan 2019-2024.

4.5.2 Uji Simultan (F)

Tabel 7. Hasil uji simultan

F-statistic	210.6774
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil analisis, nilai F-Statistik sebesar 210,6774 dengan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0000 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Indeks Zakat Nasional, Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di enam kabupaten/kota di

Provinsi Banten. Dengan demikian, kelima variabel tersebut penting untuk dipertimbangkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil uji koefisien determinasi

R-squared	0.988273
Adjusted R-squared	0.983582

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Banten sebesar 98%. Sementara itu, 2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dianalisis. Temuan ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya jelas yang sangat tinggi terhadap variasi kemiskinan, meskipun masih terdapat sejumlah kecil pengaruh dari variabel lain yang belum dimasukkan dalam kajian.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Indeks Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan

Pengujian yang telah dilakukan untuk variabel Indeks Zakat Nasional (X_1) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,7411, yang lebih besar dari 0,05 ($0,7411 > 0,05$). Hasil ini menggambarkan bahwa secara statistik pengaruh Indeks Zakat Nasional terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten tidak signifikan. Meskipun demikian, koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan arah hubungan yang positif.

bawa pengaruh variabel Indeks Zakat Nasional (IZN) terhadap kemiskinan di Provinsi Banten masih tergolong kecil. Meskipun kinerja zakat atau IZN dalam membantu mustahik sudah cukup baik, namun kontribusinya masih terbatas apabila dibandingkan dengan besarnya angka kemiskinan yang ada. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana zakat yang disalurkan, dimana Potensi zakat di Banten sebesar 11,03 triliun (Baznas, 2023) sedangkan hanya 34 miliar yang berhasil dihimpun dalam periode laporan keuangan tahun 2024 (Baznas, 2024).

Rendahnya realisasi penghimpunan zakat di Provinsi Banten menyebabkan terbatasnya program pemberdayaan ekonomi dan bantuan yang dapat disalurkan kepada mustahik guna mengentaskan kemiskinan, sehingga hal ini dapat mengganggu efektifitas serta kontribusi zakat sendiri dalam mengurangi angka kemiskinan secara luas. Oleh karena itu, diperlukan adanya optimalisasi penghimpunan zakat melalui peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat Provinsi Banten.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2023) yang meneliti terkait pengaruh zakat yang menggunakan data IZN terhadap kemiskinan moneter (BPS) serta kemiskinan multidimensi yang didapat hasil bahwa IZN tidak berpengaruh terhadap kemiskinan moneter (BPS) dan untuk kemiskinan multidimensi hanya kemiskinan mikro yang berpengaruh dan selaras juga dengan penelitian Alfian *et al* (2022) yang mendapatkan hasil bahwa dampak dari kinerja zakat melalui pengukuran IZN masih belum terlihat dampaknya terhadap kemiskinan.

4.6.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang telah dilakukan untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan dengan koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan negatif terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Banten, yang artinya apabila tingkat Indek Pembangunan Manusia naik maka akan menurunkan kemiskinan.

Hal ini bisa dijelaskan dari fungsi IPM sendiri yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui 3 aspek dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan hidup layak (Karyono *et al.*, 2021). Ketika nilai IPM suatu wilayah meningkat, artinya penduduknya memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan serta hidup layak, kondisi ini secara langsung berkontribusi kepada peningkatan kapasitas individu meraih pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga terbebas dari kemiskinan.

Secara teori, peningkatan indeks pembangunan manusia dapat memperkuat modal manusia atau *human capital*, yang menjadi faktor utama dalam pengurangan kemiskinan jangka panjang. Menurut penelitian Moyo *et al* (2022) peningkatan modal manusia akan menurunkan kemiskinan karena pendidikan yang baik akan meningkatkan keterampilan, sementara kesehatan yang baik maka akan menjaga produktivitas. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila IPM menjadi variabel yang berpengaruh signifikan.

Hal ini juga diperkuat dengan fakta data yang ada dalam penelitian ini bahwa dalam periode 2019-2024 wilayah-wilayah yang tingkat Indeks Pembangunan Manusia nya tinggi ialah wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, hal tersebut karena wilayah-wilayah yang tingkat IPM nya tinggi cenderung memiliki infrastruktur sosial dan ekonomi yang baik, seperti sekolah, rumah sakit dan peluang pekerjaan yang luas. Masyarakat di wilayah ini memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dibandingkan wilayah yang memiliki IPM yang rendah.

Hasil dalam penelitian ini juga selaras dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan Putra & Wirda (2024) yang mendapatkan hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahra *et al* (2024) dengan studi kasus di Lampung, Suci *et al* (2023) dengan studi kasusnya di Yogyakarta dan Mauludi & Rahmawati (2023) yang mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini.

4.6.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang telah dilakukan untuk variabel Upah Minimum (X3) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan dengan koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan positif, yang artinya bahwa setiap peningkatan upah minimum maka akan meningkatkan kemiskinan di periode 2019-2024.

Hasil ini mungkin tampak tidak intuitif pada awalnya, namun dapat dijelaskan melalui beberapa aspek ekonomi, salah satu penjelasan logis adalah bahwa kenaikan UMK dalam pasar tenaga kerja yang tidak stabil justru bisa mendorong para pengusaha untuk mengurangi jumlah tenaga kerja karena naiknya biaya produksi, pengusaha akan melakukan pemecatan atau mengganti pekerjanya dengan mesin, sehingga hal tersebut akan berdampak kepada kesejahteraan pegawai akibat tidak mempunyai modal karena kehilangan pekerjaan (Li *et al.*, 2021).

Selain akan berdampak pada ketenagakerjaan, penetapan upah minimum guna mengentaskan kemiskinan menurut penelitian Degerli & Alp (2024) bisa mengakibatkan inflasi. Dan apabila inflasi tersebut lebih tinggi dari pendapatan rill masyarakat miskin, maka mereka justru mereka bisa semakin tertekan secara ekonomi. Hal tersebut juga diperkuat dengan data BPS bahwa pekerja formal (50,27%) lebih tinggi dari pekerja informal (49,73%) pada Februari tahun 2024 di Banten, namun tingkat kemiskinan yang ada di Banten pada September 2024 didominasi oleh kemiskinan pedesaan (6,29%) dibandingkan perkotaan (5,57%). Dimana di pedesaan banyak masyarakatnya yang bekerja pada sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan atau manfaat langsung dari kebijakan UMR ini, maka kenaikan UMR ini tidak serta merta mengurangi kemiskinan justru akan menyebabkan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja jika tidak disertai dengan kebijakan pengaman sosial lainnya.

Penelitian terdahulu dengan hasil yang sama pernah didapatkan oleh Rahmawati *et al* (2022) yang mendapatkan hasil yang sama dengan peneliti dapatkan bahwa Upah Minimum berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan di Indonesia, hal tersebut juga didapatkan oleh Mauludi & Rahmawati, (2023) di Jawa Timur, Candra & Dewi, (2024) di Bali seta Kurta & Oruc (2020) di Bosnia dan

Harzegovina yang mendapatkan hasil bahwa upah minimum berdampak positif terhadap ketimpangan dan kemiskinan.

4.6.4 Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang telah dilakukan untuk variabel Pengangguran Terbuka (X4) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1904 yang lebih besar dari 0,05 ($0,1904 > 0,05$). Hasil ini menggambarkan bahwa secara statistik pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tidak signifikan.

Hasil ini mungkin aneh namun hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal. Pertama, seperti penelitian Kharisma *et al* (2020) dimana program bantuan sosial, zakat, subsidi atau bentuk transfer sosial lainnya oleh pemerintah maupun lembaga sosial seperti BAZNAS dapat menahan bahkan mengatasi kemiskinan. Dengan kata lain, masyarakat bisa tetap bertahan secara ekonomi meskipun tidak bekerja secara formal, karena mendapat bantuan dari program sosial.

Selain itu, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan formal namun dianggap tidak menganggur karena melakukan pekerjaan subsisten, seperti bertani untuk kebutuhan konsumsi sendiri atau berdagang kecil kecilan. Karena itu, mungkin tingkat pengangguran mungkin kurang mencerminkan kondisi ekonomi rill di tingkat rumah tangga miskin, sehingga tidak memiliki pengaruh kuat dalam analisis statistik.

Penelitian dengan hasil yang sama didapatkan sama diteliti oleh Suci *et al* (2023) yang dimana pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Yogyakarta, penelitian penelitian Fitriana (2021) pada kemiskinan di Indonesia, penelitian Faruq & Yuliana (2023) pada kemiskinan Jawa Tengah dan Siregar *et al* (2022) pada kemiskinan di Mandailing Natal.

4.6.5 Pengaruh Rasio Gini Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang telah dilakukan untuk variabel Rasio Gini (X5) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,8283 yang lebih besar dari 0,05 ($0,8283 > 0,05$). Hasil tersebut menggambarkan bahwa secara statistik pengaruh rasio gini terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tidak signifikan. Meskipun koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan arah hubungan yang positif.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa rasio gini bersifat relatif dimana ketika pendapatan masyarakat kaya naik sedangkan masyarakat miskin tetap maka rasio gini akan naik tetapi kemiskinan tidak, apabila tidak ada perubahan pendapatan pada kalangan bawah. Sehingga perubahan rasio gini tidak selalu diikuti dengan perubahan pada tingkat kemiskinan (Dutt & Tsetlin, 2020). Maka rasio gini sebaiknya digunakan bersamaan dengan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, transfer nasional serta pdb perkapita agar lebih efektif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan (Min *et*

al., 2024). Inilah yang menyebabkan di beberapa kasus rasio gini tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Selain itu, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah 2 hal yang berbeda dimana apabila kemiskinan terlihat siapa yang mengalami sedangkan rasio gini tidak, maka suatu daerah bisa mengalami rasio gini yang tinggi tetapi masyarakat miskin nya rendah, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh dengan data yang ada dalam penelitian ini dimana wilayah dengan rasio gini paling tinggi bahkan melewati rata-rata rasio gini provinsi yakni Kota Tangerang Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling rendah di Banten bahkan salah satu yang paling rendah di Indonesia.

Penelitian dengan hasil yang sama di teliti oleh Seran & Hallan (2020) Latifah *et al* (2024) yang mendapatkan hasil bahwasanya rasio gini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, hasil yang sama juga di wilayah lain yang diteliti oleh Anggoro (2024) dalam wilayah pulau Jawa dan Setiowati (2023) dalam wilayah Surabaya.

4.6.6 Pengaruh Indeks Zakat Nasional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka Dan Rasio Gini Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, kelima variabel independen yaitu Indeks Zakat Nasional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka dan Rasio gini secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian F yang mendapatkan nilai Probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan bahwa model regresi secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi dari tingkat kemiskinan di wilayah yang diteliti.

Hasil ini sesuai dengan teori vicious circle of poverty atau teori lingkaran kemiskinan yang dipopulerkan oleh Ragnar Nurkse tahun 1953 dalam Goni *et al* (2022) yang menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di masyarakat menjadi sangat sulit diatasi diakibatkan ada beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor tersebut meliputi ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan sumber daya manusia dan kekurangan modal. Yang Dimana variabel dalam penelitian ini mewakili ke tiga faktor tersebut, yang menandakan bahwasanya indeks zakat nasional, indeks pembangunan manusia, upah minimum, pengangguran terbuka dan rasio gini memiliki peran penting dalam kemiskinan sehingga uferiyapaya untuk mengatasi kemiskinan diperlukan untuk mengimplementasikan faktor – faktor tersebut secara bersama agar lebih efektif.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nur Feriyanto, Dityawarman EL Aiyubbi dan Achmad Nurdany (2020) yang berjudul “The Impact Of Unemployment, Minimum Wage, And Real Gross Regional Domestic Product On Poverty Reduction In Provinces Of Indonesia The Impact Of Unemployment, Minimum Wage, And Real Gross Regional

Domestic Product On Poverty Reduction In Provinces Of Indonesia" dengan hasil upah minimum dan pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian Nurul Agniya (2023) yang berjudul "Pengaruh Kinerja Zakat Dan Variabel Makroekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Empiris Pada 34 Provinsi Di Indonesia)" yang mendapatkan hasil bahwasanya kinerja zakat, indeks pembangunan manusia dan rasio gini berpengaruh terhadap kemiskinan secara simultan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Risky Dwi Aprian (2019) yang berjudul "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Periode Tahun 2010-2018" dengan hasil upah minimum dan pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Indeks zakat nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten pada periode 2019 – 2024 yang dimana hasil ini dapat di jelaskan bahwa dampak dari zakat sendiri masih kecil apabila dibandingkan kemiskinan yang ada. Hal ini diakibatkan karena pengumpulan dana zakat belum maksimal.

1. Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten pada periode 2019 – 2024 yang dimana hasil ini memiliki arti apabila indeks pembangunan manusia naik maka kemiskinan akan turun, hal ini tidak mengherankan karena kualitas sumberdaya manusia sangat penting dalam kesejahteraan.
2. Upah minimum berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten pada periode 2019 – 2024 yang dimana hasil ini berarti dengan adanya kenaikan upah minimum dalam pasar tenaga kerja yang tidak sempurna atau pada pekerja formal yang didominasi pekerja non ahli maka hal tersebut akan berdampak pada hilang nya pekerjaan yang diakibatkan pemecatan atau diganti dengan robot karena biaya pegawai yang sangat mahal.
3. Pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten pada periode 2019 – 2024 yang dimana hasil ini berarti dalam kasus di Banten periode 2019 – 2024 kemiskinan yang terjadi di wilayah ini didominasi oleh kemiskinan pedesaan yang dimana di pedesaan didominasi oleh pekerja informal yang melakukan pekerjaan subsisten, seperti bertani untuk kebutuhan konsumsi sendiri atau berdagang kecil kecilan. Selain itu, transfer dana sosial juga banyak dilakukan sehingga menahan orang tersebut jatuh dalam kemiskinan.
4. Rasio gini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten pada periode 2019 – 2024 yang dimana rasio gini dan

- kemiskinan 2 hal yang berbeda, selain itu penerapan kebijakan rasio gini untuk mengentaskan kemiskinan lebih efektif apabila pengimplementasianya di barengi dengan variabel lain.
5. Secara simultan variabel indeks zakat nasional, indeks pembangunan manusia, upah minimum, pengangguran terbuka dan rasio gini berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten pada periode 2019 – 2024 yang dimana hasil ini menerima hipotesis.

4.2 Saran

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan pada data yang diteliti, dimana hanya 6 dari 8 wilayah Provinsi Banten yang dapat dijadikan sampel. Hal ini disebabkan oleh data yang tidak tersedia pada salah satu variabel yang diperlukan dalam analisis. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah dengan menggunakan seluruh wilayah yang ada di Provinsi Banten. Selain itu, disarankan untuk memperpanjang periode waktu yang dianalisis, dengan tujuan agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai masalah yang terjadi. Kemudian apabila data yang ada tetap terbatas, peneliti menyarankan agar objek penelitian dipindah ke provinsi lain yang memiliki karakteristik serupa atau berbeda, pemilihan provinsi yang berbeda dapat memperluas pandangan tentang fenomena yang diteliti, serta mengurangi bias dari keterbatasan data dan cakupan wilayah. Serta diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang sekiranya berkaitan dengan kondisi kemiskinan dan mengubah jenis penelitian. Contoh, menjadikan IZN sebagai variabel intervening.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Agniya, N. (2023). Pengaruh Kinerja Zakat Dan Variabel Makroekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Empiris Pada 34 Provinsi Di Indonesia). Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Akbar, A., Nazipawati, Primandari, Novegya Ratih, & Muhamrah, N. Al. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2017-2020. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(2), 80–91.
- Alfian, A. M., Pujiyono, A., & Alfian, A. (2022). Analisis Model Indeks Zakat Nasional Untuk Menilai Kinerja Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Solok Sumatera Barat Tahun 2020). *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 44–62.
- Amsari, S., Sugianto, Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 1403–1412.

- Anggoro, T. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di PulauJawa Periode 2012-2022. *Journal Of Regional Economics And Development*, 1(2), 1-12.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42.
- Basuki, T. A., & Prawoto, N. (2016). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bahan Ajar Regresi Data Panel Panduan Regresi Data Panel*. Raja Grafindo.
- Baznas Banten. (2023). *Audiensi, Dprd Provinsi Banten Siap Mendukung Baznas Banten Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat*. Bbnews.Baznas Banten. <Https://Bbnews.Baznasbanten.Or.Id/Blog/Read/Audiensi-Dprd-Provinsi-Banten-Siap-Dukung-Baznas-Banten-Mengoptimalkan-Pengelolaan-Zakat>
- Baznas, B. (2024). *Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024*. <https://baznasbanten.or.id/laporan-keuangan/>.
- Baznas, P. (2024). *Laporan Pengukuran Indeks Zakat Nasional Dan Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Tahun 2023 Baznas Dan Laz* (Vol. 8).
- Candra, I. P. Y. S. A., & Dewi, D. N. P. M. (2024). Analysis Of Several Factors That Influence Poverty Levels In Bali Province With Unemployment As An Intervening Variable. *International Journal Of Social Science And Human Research*, 07(02), 1225–1235.
- Dutt, Pushan Dan Tsetlin, Ilia, Distribusi Pendapatan Dan Pembangunan Ekonomi: Wawasan Dari Pembelajaran Mesin (31 Maret 2020). Makalah Kerja Insead No. 2019/39/Eps/Dsc, Tersedia Di Ssrn: <Https://Ssrn.Com/Abstract=2701744>
- Faruq, M. Al, & Yuliana, I. (2023). The Effect Of Population Growth On Poverty Through Unemployment In East Java Province In 2017-2021. *Journal Of Social Research*, 2(6), 1900–1915. <Https://Doi.Org/10.55324/Josr.V2i6.872>
- Fitriana, N. (2021). Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Fuady, M. R. F., Fuady, M., & Aulia, F. (2021). Kemiskinan Multi Dimensi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Tataloka*, 23(4), 575–582.
- Fudhail, I., Sambodo, H., & Purnomo, S. D. (2021). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Analisis Interaksi Spasial Perekonomian Di Provinsi Jawa Timur. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 43-52.
- Goni, N., Kalangi, J. B., & Tolasant, K. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 121–132.
- Husni, A. H. A. A., Rusli, A. ., Syamsu, S., & Ansar, M. C. (2023). Upah Minimum Dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kebijakan Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 275–298.
- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, Dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 1-22.
- Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *Esa: Jurnal Ekonomi Syariah*,

- 3(1), 111–133.
- Karyono, Y., Tusianti, E., Gunawan, I G. N. A., Nugroho, A., & Alvina, C. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Kharisma, B., S. Remi, S., Syaiful, M., & Abdillah, R. (2020). The Impact Of Local Governments' Social Transfers On Poverty Reduction In Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 330–340.
- Khatimah, H. (2021). *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Uin Alaudin Makasar.
- Kurta, A., & Oruc, N. (2020). The Effect Of Increasing The Minimum Wage On Poverty And Inequality In Bosnia And Herzegovina. *Economic Annals*, 65(226), 121–137.
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 61-72.
- Latifah, S. N., Fathorrazi, M., Yuliaty, L., & Yunitasari, D. (2024). Modeling Poverty Alleviation In Indonesia According To Ibnu Khaldun Philosophy (An Approach To Morality In The Qur'an). *Pharos Journal Of Theology*, 105(1), 1–14.
- Li, Y., Zhang, J., & Deng, X. (2021). The Minimum Wage As Method Of Alleviating Poverty: Current Practices Versus Alternative Policy And Legal Resolutions. *Journal Of Politics And Law*, 14(4), 14-18.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342.
- Mauludi, A. A., & Rahmawati, F. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 S/D 2021. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 68–88.
- Mauludi, A. A., Fadli, & Rahmawati, F. N. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 S/D 2021. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 68–88.
- Min, J., Soergel, B., Kikstra, J., Koch, J., & Ruijven, B. Van. (2024). Income And Inequality Pathways Consistent With Eradicating Poverty. *Environmental Research Letters*.
- Moyo, C., Mish, S., & Ncwadi, R. (2022). Human Capital Development, Poverty And Income Inequality In The Eastern Cape Province. *Development Studies Research*, 9(1), 36–47.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). Penelitian Bisnis : Teknik Dan Analisa Data Dengan Spss - Stata - Eviews. In *Madenatera* (1st Ed.).
- Oktaviani, N., Rengganis, S. P., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021. *Ebismen: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 248–253.

- Parulian, T. R., & Hukom, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah. *Manajemen Kreatif Jurnal (Makreju)*, 1(2), 81-91.
- Pratama, S. D. (2023). The Role Of Zakat In Alleviating Multidimensional Poverty. *International Journal Of Islamic Economics And Finance (Ijief)*, 6(1), 133–150.
- Putra, T. J., & Wirda, F. (2024). What Is Economic Growth And Human Development Influence On Poverty In West Sumatra. *International Journal Of Applied Finance And Business Studies*, 11(4), 922–927.
- Putri, F. M. (2023). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Uin Raden Intan Lampung.
- Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(6), 1–23.
- Rahmawati, N., Prasetyanto, P. K., & Islami, F. S. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipdm), Upah Minimum Regional (Umr), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). *Convergence : The Journal Of Economic Development*, 4(1), 19–31.
- Seran, S., & Hallan, A. N. (2020). Dependency Ratio, Inflation And Gini Ratio To Economic Growth And Population Poverty In Indonesia. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 9(12), 361–369.
- Setiowati, R. (2023). Pengaruh Gini Rasio, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (Ipdm) Terhadap Kemiskinan Di Kota Surabaya Tahun 2010-2019. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Shilat, N. F., Andreansyah, F., & Firdaus, L. A. (2024). Kemiskinan Dalam Islam : Faktor Penyebab Dan Solusinya. *Jbep: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(2), 162–174.
- Siara, E. (2021). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Bebesen*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Siregar, E. S., Batubara, I., & Siregar, E. S. (2022). The Effect Of Unemployment On Poverty In Mandailing Natal. *Adpebi International Journal Of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 120–125.
- Siregar, F. A., & Hidayat, A. (2024). Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Profjes : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(1), 25–34.
- Suci, L. Etika, Addainuri, M. I., & Abidin, M. (2023). The Effect Of Economic Growth, Education, Unemployment, And Human Development Index On Poverty In The Special Region Of Yogyakarta For Period 2015-2021. *Jiet (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(2), 284–296.
- Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, & Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Syamsuri, Sa'adah, Y., & Roslan, I. A. (2022). Reducing Public Poverty Through Optimization Of Zakat Funding As An Effort To Achieve Sustainable

- Development Goals (Sdgs) In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 792-805.
- Varlitya, C. R., Masbar, R., Jamal, A., & Nasir, M. (2023). Do Regional Macroeconomic Variables Influence The Income Inequality In Indonesia? *Ikonomicheski Izsledvania*, 32(1), 180–199.
- Zahra, B. Shavira, Mevia, R. D. A., Sona, R. A., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Pada Periode 2012-2023. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3), 01–15.

